

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu peristiwa pelaporan keuangan di Indonesia berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan disajikan berdasarkan data-data dimana data-data tersebut terdapat beberapa penyimpangan sesuai dengan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai auditor eksternal pemerintah. Beberapa temuan yang telah diperoleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yaitu anggaran daerah dan pengelolaan keuangan atas anggaran yang telah disetujui. Anggaran yang telah digunakan untuk menyusun laporan anggaran tersebut sebagai tanggung jawab atas pengelolaan anggaran. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas tugas yang telah dilakukannya maka pemerintah berkewajiban untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peristiwa mengenai pelaporan keuangan sangat krusial karena berpengaruh terhadap pengambilan keputusan bagi pihak internal dan eksternal. Menurut Suwarjono (2014) informasi keuangan harus memiliki nilai yang nantinya dapat bermanfaat bagi pemakainya. Informasi keuangan dikatakan bermanfaat jika mampu mempengaruhi *stakeholder* terhadap pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas memberikan informasi yang berkualitas dan sebaliknya, jika laporan keuangan buruk juga akan memberikan informasi yang buruk. Dengan menghasilkan laporan keuangan yang baik akan membentuk kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah. Maka dari itu sangat penting untuk menyajikan laporan keuangan sebaik mungkin karena laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan laporan keuangan yang bermanfaat sehingga mampu digunakan untuk pengambilan keputusan yang berdampak pada pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik menghasilkan laporan keuangan yang telah audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Kriteria kualitas laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 terdiri: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan jika mampu memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dikatakan andal jika terbebas dari hal yang menyesatkan, kesalahan yang material, menyajikan dengan jujur, dan dapat diverifikasi. Agar dapat diandalkan maka laporan keuangan harus disajikan dengan lengkap, tidak boleh ada informasi yang ditutupi dengan sengaja karena akan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan. Laporan keuangan dikatakan dapat dibandingkan jika pemakai dapat memperbandingkan laporan keuangan untuk antar periode maupun untuk antar industri.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu kompetensi sumber daya manusia. Menurut

Mangkunegara (2012) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang dan berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik pribadi yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap kinerjanya. Jika sumber daya tersebut memiliki keterbatasan pengetahuan ilmu akuntansi maka akan timbul kurang pahaman dalam melakukan tugasnya di bagian akuntansi. Karena keterbatasan tersebut sehingga diperlukan adanya pelatihan untuk membantu pegawai dalam melaksanakan tugas pada penyusunan laporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa program pendidikan dan pelatihan dalam jabatan merupakan upaya yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Dalam penelitian Wahyuni, et al. (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sholohah & Sulistyawati (2018) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah, yaitu PTI (Pemanfaatan Teknologi Informasi). Menurut Sutabri (2014) dalam melakukan pengolahan data, memperoleh data, dan menyimpan data, dibutuhkan yang namanya teknologi informasi atau TI sehingga nantinya akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas. Informasi dikatakan berkualitas jika informasi tersebut bersifat relevan, akurat dan tepat waktu untuk pengambilan suatu keputusan bagi perorangan maupun bagi organisasi. Penelitian Julita (2018)

menyatakan bahwa pemanfaatan dari teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas pada laporan keuangan. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon & Basid (2019) yang menyatakan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) diberikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kepada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Ciamis lima tahun berturut-turut dari tahun 2014 hingga 2018. Berdasarkan opini yang diberikan mencerminkan bahwa Kabupaten Ciamis mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar dan memiliki pengendalian yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara nasional yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya pada tingkat Kabupaten sehingga berdampak juga pada peningkatan Provinsi.

Tabel 1.1 Opini BPK RI

Tahun	Provinsi				Kabupaten			
	WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
2014	76%	21%	3%	0%	41%	50%	8%	1%
2015	85%	15%	0%	0%	54%	38%	7%	1%
2016	91%	9%	0%	0%	66%	29%	5%	0%
2017	97%	3%	0%	0%	72%	24%	4%	0%
2018	94%	6%	0%	0%	79%	18%	3%	0%

Sumber: IHPS 1 BPK-RI tahun 2015-2019

Tabel 1.1 Opini BPK RI (Lanjutan)

Tahun	Kota			
	WTP	WDP	TMP	TW
2014	60%	40%	0%	0%
2015	65%	33%	2%	0%
2016	77%	22%	1%	0%
2017	86%	14%	0%	0%
2018	90%	9%	1%	0%

Sumber: IHPS 1 BPK-RI tahun 2015-2019

Penelitian yang dilakukan saat ini berdasarkan replikasi dari peneliti sebelumnya, yaitu Tampubolon & Basid (2019) yang berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Perbedaan pada penelitian saat ini dari penelitian sebelumnya yakni pada sampel yang dimana lokasi pada penelitian terdahulu berada di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Ciamis, Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan penulis menghilangkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel bebas (independen) karena jika dibandingkan dengan beberapa penelitian lain variabel komitmen organisasi sudah menunjukkan hasil yang konsisten. Peneliti melakukan penggabungan beberapa variabel dari penelitian sebelumnya berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan rumusan masalah untuk penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan identifikasi pada persoalan yang telah dirumuskan, maka adanya tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) terhadap kualitas laporan keuangan pada PEMDA (Pemerintah Daerah).
2. Menganalisis PTI (Pemanfaatan Teknologi Informasi) terhadap kualitas laporan keuangan pada PEMDA (Pemerintah Daerah).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan untuk penulis dalam bidang akuntansi sektor publik dan juga sebagai salah satu syarat untuk menembuh tugas akhir pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Penulis Lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi, informasi pendukung, dan mengkaji topik-topik yang berkaitan dalam masalah ini bagi penulis lain untuk penelitian yang akan datang agar dapat melakukan penelitian lebih luas mengenai bidang akuntansi sektor publik.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Daerah akan memperoleh pengetahuan tentang seberapa pentingnya kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas pembahasan di dalam penelitian ini sehingga sistematika yang dibuthkan adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang di dalam penelitian yang di hubungkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini berisi penjelasan pada dasar teori dan penjelasan variabel, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, populasi, dan sampel. Di tambah dengan teknik atau cara pengumpulan data, definisi dan pengukuran suatu variabel, dan metode analisis data penelitian yang dilakukan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai penjabaran pada objek yang diteliti dan analisis yang kemudian hasilnya dapat dibuat kesimpulan hingga menjadi saran.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran.

